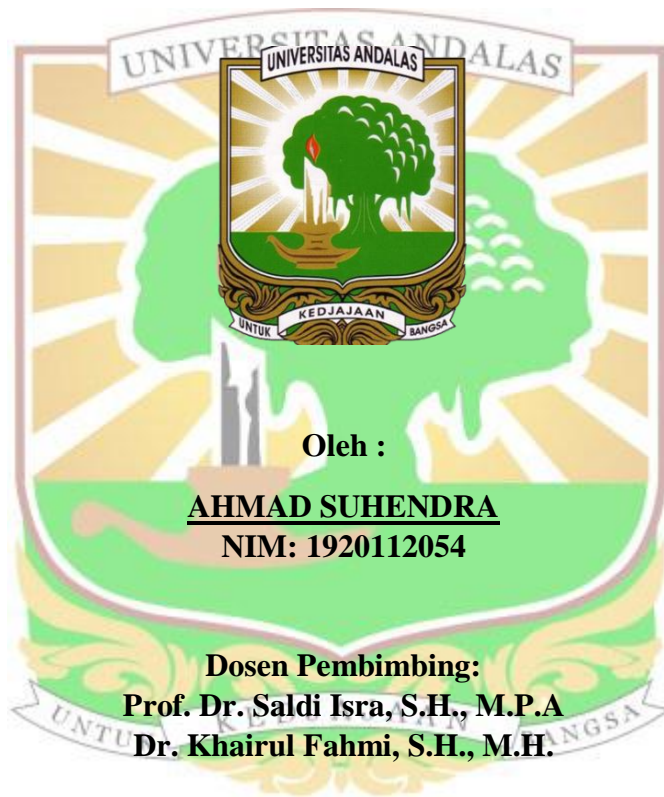


**KEADILAN PEMILU DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASANGAN CALON TUNGGAL  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN PASAMAN**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pada tahun 2020, Kabupaten Pasaman melaksanakan Pemilihan Kepada Daerah dengan pasangan calon tunggal. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Penelitian berfokus pada melihat keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal tahun 2020 di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengenai potret pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman. Kedua, bagaimana keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal serta memberikan usulan desain aturan pelaksanaan kampanye. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat kekosongan hukum pada metode kampanye penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik pada Pemilihan dengan satu Pasangan Calon. (2) Kekosongan hukum tersebut menimbulkan persaingan yang tidak adil pada pelaksanaan kampanye antara pasangan calon tunggal dan kolom kosong, serta usulan desain pelaksanaan kampanye pada Pemilihan dengan satu pasangan calon yakni merevisi aturan syarat ambang batas pencalonan sebagai upaya memperkecil kemungkinan terjadinya pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal. Merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2015 dengan memasukkan secara jelas aturan penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik. Serta penguatan partisipasi masyarakat *the third party campaign* dengan memasukkan indikator persaingan yang bebas dan adil pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.